

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Dalam melakukan penelitian, perlu adanya suatu metode atau cara sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu.

Metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sugiyono (2017:2) memberikan pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey dengan pendekatan metode deskriptif dan verifikatif. Metode penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur, dan sebagainya.

Sedangkan penelitian survey yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2017:14) pengertian penelitian survey sebagai berikut:

“Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi dan hubungan-hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis.”

Penelitian survey dilakukan untuk membuat generalisasi dari sebuah pengamatan terhadap pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dan hasilnya akan lebih akurat jika menggunakan sampel yang *representatif* (mewakili) sehingga diharapkan akan terbentuk suatu generalisasi yang akurat.

3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian yang menjadi sasaran dimaksudkan untuk mendapat jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang terjadi.

Menurut Sugiyono (2017:38) pengertian dari objek penelitian adalah:

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Objek dalam penelitian ini yaitu pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah.

3.1.3 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode deskriptif dan verifikatif.

Menurut Sugiyono (2017:147) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah:

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (mean).

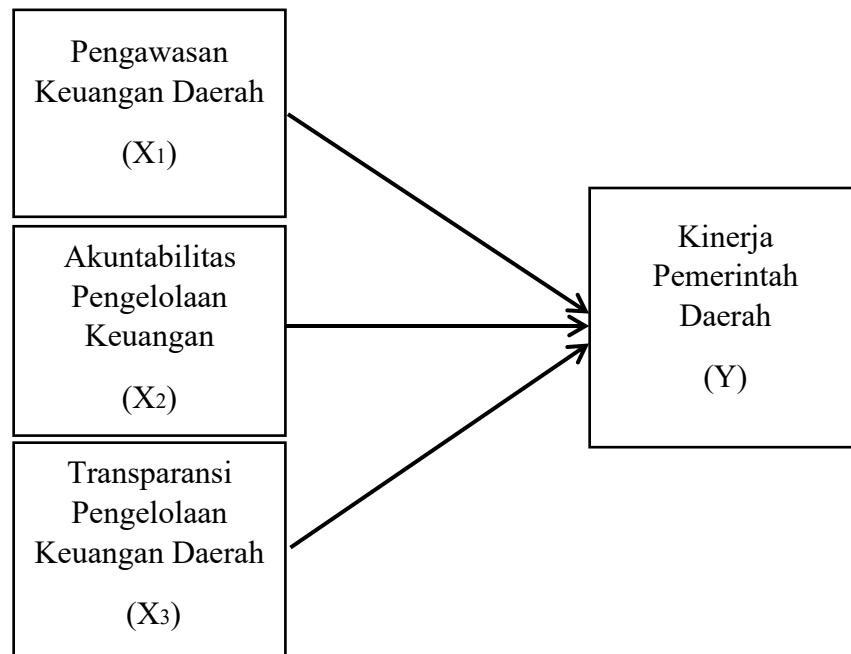
Sedangkan pengertian dari metode verifikatif menurut Moh. Nazir (2011:91) adalah:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis, melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”

Pendekatan verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah baik secara parsial maupun simultan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan).

3.1.4 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi fenomena-fenomena yang sedang diteliti, hal ini sesuai dengan judul skripsi “Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah”. Maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Penelitian

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, apa yang akan diteliti oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

Berikut adalah pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017 : 38) adalah :

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2017:61) pengertian variabel independen adalah:

“Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah Pengawasan keuangan daerah (X_1), Akuntabilitas pengelolaan keuangan (X_2), Transparansi pengelolaan keuangan (X_3), Penjelasan ke tiga variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan keuangan daerah (X_1)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011:

“Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien”

Adapun dimensi pengawasan keuangan daerah menurut Siswanto (2009:149),

adalah:

1. “Akurat (*Accurate*)
 2. Tepat waktu (*Timely*)
 3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)
 4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*)
 5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)
 6. Secara organisasi realistis (*Organizationally realistic*)
 7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*)
 8. Fleksibel (*Flexible*)
 9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)
 10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*)”
- b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan (X_2)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Menurut Adisasmita (2011:81):

“Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggungjawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.”

Adapun dimensi Akuntabilitas pengelolaan keuangan menurut Hopwood dan

Tomkins, Elwood, dalam Mahmudi (2013:9):

1. “Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial”

c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_3)

Transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010):

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Adapun dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2009:19):

1. “Informatif (Informative)
2. Keterbukaan (Openness)
3. Pengungkapan (Disclosure)”

2. Variable Terikat (*Dependen Variabel*)

Menurut Sugiyono (2017:61) pengertian variabel dependen adalah:

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kinerja pemerintah daerah (Y). Menurut Mohamad Mahsun (2012: 141) adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota/karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga”.

Adapun dimensi kinerja pemerintah daerah menurut Mohamad Mahsun (2012:148):

1. “Masukan (*Input*)
2. Proses (*Process*)
3. Keluaran (*Output*)
4. Hasil (*Outcomes*)
5. Manfaat (*Benefit*)
6. Dampak (*Impact*)”

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar. Agar dapat lebih jelas untuk mengetahui variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Opasonalisasi Variabel Independen

Pengawasan Keuangan Daerah (X₁)

Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien	Karakteristik Pengawasan keuangan:	1. Mampu mendorong para karyawan agar menghasilkan informasi yang benar dan real 2. Mampu memperbaiki permasalahan	Ordinal	1-3
	2. Tepat waktu (<i>Timely</i>)	1. Mampu mendorong agar karyawan menghasilkan informasi tepat waktu 2. Informasi yang dapat dikelompokkan dan dievaluasi	Ordinal	4-6
	3. Objektif dan Komprehensif (<i>Objective and Comprehesible</i>)	1. Informasi dalam suatu sistem pengendalian mudah dipahami dan dianggap objektif	Ordinal	7-8
	4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (<i>Focus on strategic control points</i>)	1. Sistem pengendalian yang efektif dilaksanakan pada tempat yang strategis dan sesuai kebutuhan	Ordinal	9-10
	5. Secara Ekonomi Realistik (<i>Economically Realistic</i>)	1. Pengeluaran biaya untuk implementasi sebaiknya ditekan seminimum mungkin 2. Tidak adanya	Ordinal	11-12

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011		pemborosan		
	6. Secara organisasi realistis (<i>Organizationally realistic</i>)	- Individu dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang dicapainya dan imbalan yang akan diterima - Standar kerja yang realistis	Ordinal	13-14
	7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (<i>Coordinated with the organization's work flow</i>)	- Informasi pengendalian perlu dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi - Informasi yang dihasilkan dapat diterima	Ordinal	15-16
	8. Fleksibel (<i>Flexible</i>)	Sistem pengendalian dapat mengikuti perkembangan organisasi	Ordinal	17
	9. Preskriptif dan operasional (<i>Prescriptive and operational</i>)	Dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan	Ordinal	18
	10. Diterima para anggota organisasi (<i>Accepted by organization members</i>)	Sistem pengendalian sebaiknya berhubungan dengan tujuan dan prinsip agar dapat diterima	Ordinal	19-20
Siswanto (2009:149)				

Tabel 3.2

Opasonalisasi Variabel Independen

Akuntabilitas Keuangan Daerah (X₂)

Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut Halim (2007:87)	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi 2. Menaati ketentuan hukum yang berlaku.	Ordinal	21-24
	2. Akuntabilitas Manajerial	1. Pengelolaan organisasi secara efektif dan efisiensi	Ordinal	25-26
	3. Akuntabilitas Program	1. Pencapaian visi, Misi dan Tujuan organisasi 2. Strategi	Ordinal	27-29
	4. Akuntabilitas Kebijakan	1. Pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil	Ordinal	30-31
	5. Akuntabilitas Finansial Tomkins, Elwood, dalam Mahmudi (2013:9)	1. Penggunaan dana publisecara efektif, efisien dan ekonomis 2. Mebuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi	Ordinal	32-37

Tabel 3.3

Opasonalisasi Variabel Independen

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₃)

Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintah (2010)	Karakteristik Transparansi: 1. Informatif (<i>Informative</i>)	1. Jelas, akurat dan Tepat Waktu 2. Mudah Diakses 3. Memadai 4. Dapat diperbandingkan	Ordinal	38-43
	2. Keterbukaan (<i>Openness</i>)	1. Setiap informasi publik harus bersifat terbuka 2. Setiap informasi publik harus mudah diakses	Ordinal	44-45
	3. Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) Mardiasmo (2009:19)	1. Kondisi Keuangan 2. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan 3. Susunan Pengurus	Ordinal	46-48

Tabel 3.4

Operasionalisasi Variabel Dependen

Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam <i>strategic planning</i> suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota / karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga Mohamad Mahsun (2012: 141)	Karakteristik kinerja pemerintah daerah 1. Masukan (<i>Input</i>)	1. Jumlah dana yang dibutuhkan 2. Jumlah pegawai yang dibutuhkan. 3. Jumlah infrastruktur yang ada. 4. Jumlah waktu yang digunakan	Ordinal	49-52
	2. Proses (<i>Process</i>)	1. Ketaatan pada peraturan perundangan. 2. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa	Ordinal	53-54
	3. Keluaran (<i>Output</i>)	1. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. 2. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.	Ordinal	55-56
	4. Hasil (<i>Outcomes</i>)	1. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. 2. Produktivitas para karyawan atau pegawai	Ordinal	57-58
	5. Manfaat (<i>Benefit</i>)	1. Tingkat kepuasan masyarakat. 2. Tingkat	Ordinal	59-60

		partisipasi masyarakat		
	6. Dampak (<i>Impact</i>)	1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Peningkatan pendapatan masyarakat.	Ordinal	61-62
	Mohamad Mahsun (2012:148)			

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:117) pengertian populasi adalah:

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi sasaran adalah populasi yang akan digunakan untuk menjadi sasaran penelitian. Populasi merupakan sekumpulan objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan penelitian melalui kriteria tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi terdiri dari manusia atau orang, data-data atau dokumen yang dapat dipandang sebagai objek penelitian.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah Kab. Bandung Barat pada *Team* anggaran.

Adapun jumlah populasinya terdapat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.5**Tim Populasi Penelitian**

No	Dinas dan Lainnya	Populasi
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8
4	Dinas Kesehatan	10
5	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	3
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5
7	Dinas Lingkungan Hidup	5
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5
12	Dinas Pendidikan	9
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4
14	Dinas Perhubungan	9
15	Dinas Perikanan dan Peternakan	4
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8

18	Dinas Sosial	4
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7
20	Dinas Perumahan dan Pemukiman	10
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	10
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7
23	Badan Penanggulangan Bencana	5
24	Inspektorat	7
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5
26	Sekretariat DPRD	7
	Jumlah	167

3.3.2 Sampel Penelitian

Setelah menentukan populasi maka selanjutnya peneliti menentukan sampel.

Sampel merupakan bagian dari populasi, sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan suatu penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:81) pengertian sampel adalah:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).”

3.3.3 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Menurut Sugiyono (2017:82) memberikan pendapat bahwa terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu:

1. *“Probability Sampling*
2. *Non Probability Sampling”*

Berikut ini penjelasan dari dua teknik sampling yang dapat digunakan menurut Sugiyono diatas

1. *Probability Sampling*

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, sampling area (cluster).

2. *Non Probability Sampling*

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Probability Sampling*. *Propability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*.

Menurut sugiyono (2017:118):

“Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.”

Menurut Moh. Nazir (2011:271) untuk penentuan pengambilan jumlah sampel dan populasi tertentu adalah sebagai berikut:

“Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, namun jika jumlah subjeknya dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung sedikit banyaknya kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, dilihat dari sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana, dan besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.”

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 25% karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 167 responden, dengan perhitungan sebagai berikut:

Maka: $n = N \times e$

$$= 167 \times 25\% = 41,75 \text{ atau } 42$$

Jadi, anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah minimal sebanyak 42 responden. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 53

responden. Penelitian tersebut ditujukan kepada bagian-bagian yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3.6

Perhitungan Sampel Penelitian

No	Dinas dan Lainnya	Populasi	Perhitungan	Sampel
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	$n = 7 \times 25\% = 1,75$	2
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8	$n = 8 \times 25\% = 2$	2
4	Dinas Kesehatan	10	$n = 10 \times 25\% = 2,5$	2
5	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	3	$n = 3 \times 25\% = 0,75$	1
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
7	Dinas Lingkungan Hidup	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	$n = 9 \times 25\% = 2,25$	3
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	$n = 4 \times 25\% = 1$	1
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
12	Dinas Pendidikan	9	$n = 9 \times 25\% = 2,25$	3
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	4	$n = 4 \times 25\% = 1$	1

	Perempuan dan Perlindungan Anak			
14	Dinas Perhubungan	9	$n = 9 \times 25\% = 2,25$	3
15	Dinas Perikanan dan Peternakan	4	$n = 4 \times 25\% = 1$	1
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8	$n = 8 \times 25\% = 2$	2
18	Dinas Sosial	4	$n = 4 \times 25\% = 1$	1
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	$n = 7 \times 25\% = 1,75$	2
20	Dinas Perumahan dan Pemukiman	10	$n = 10 \times 25\% = 2,5$	3
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	10	$n = 10 \times 25\% = 2,5$	3
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	$n = 7 \times 25\% = 1,75$	2
23	Badan Penanggulangan Bencana	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
24	Inspektorat	7	$n = 7 \times 25\% = 1,75$	2
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
26	Sekretariat DPRD	7	$n = 7 \times 25\% = 1,75$	2
	Jumlah	167		52

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sugiyono (2017:3) Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. “Data Primer
2. Data Sekunder”

Adapun penjelasan dari sumber data berdasarkan sumbernya menurut Sugiyono adalah:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian pihak lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer tersebut bersumber dari hasil pengumpulan data berupa kuesioner kepada responden *Team Anggaran* pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kab. Bandung Barat yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai objek penelitian.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan lebih spesifik, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner (angket).

Menurut Sugiyono (2017:142), kuesioner (angket) adalah sebagai berikut:

“Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.”

3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.5.1 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:147) memberikan pengertian analisis data sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilisasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.”

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis verifikatif

Menurut Sugiyono (2017:206) analisis data adalah:

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul”. Kegiatan dalam analisis data adalah: “mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Dalam metode analisis data ini, penulis mengambil analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dalam analisis deskriptif dilakukan pembahasan mengenai rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan keuangan di pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Bagaimana kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat.

Adapun pengertian Statistik Deskriptif menurut Sugiyono (2017:254) adalah sebagai berikut :

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variable yang ada. Nilai rata-rata ini

didapat dengan menjumlahkan dari keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dalam jumlah responden.

Rumus rata-rata (mean) yang dikutip oleh Sugiyono (2017:280) adalah sebagai berikut :

$$Me = \frac{\sum x}{n}$$

Dimana :

Me = Mean (Rata-rata)

Σ = Epsilon (baca jumlah)

Xi = Nilai x ke i sampai ke n

n = Jumlah Individu

Setelah rata-rata dari masing-masing variabel di dapat, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut peneliti ambil banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) dan skor tertinggi (5) dengan menggunakan skala *likert*. Teknik skala *likert*, dipergunakan untuk mengukur jawaban.

Dalam kegiatan menganalisis data langkah-langkah yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Membuat kuesioner

Penulis membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang akan diberikan dan diisi oleh responden. Untuk mendapatkan tingkat tanggapan yang

tinggi, pertanyaan yang diajukan singkat dan jelas, serta waktu yang diperlukan untuk pengisian kuesioner tidak lebih dari 25 menit.

2. Membagikan dan mengumpulkan kuesioner

Daftar kuesioner disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan, setelah itu dikumpulkan kembali kuesioner tersebut yang telah diisi oleh responden.

3. Memberikan skor

Untuk menentukan nilai dari kuesioner penulis menggunakan skala *likert*. Setiap item dari kuesioner memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai/skor yang berbeda untuk setiap skor untuk pernyataan positif. Untuk lebih jelasnya berikut ini kriteria bobot penilaian dari setiap pernyataan dalam kuesioner yang dijawab responden dapat dilihat pada pernyataan pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.7
Bobot Penilaian Kuesioner

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Selalu	5
2	Sering	4
3	Kadang kadang	3
4	Jarang	2
5	Tidak Pernah	1

4. Menjumlahkan dan Menetapkan kriteria untuk masing masing variabel

Dalam menilai X dan Y maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Berdasarkan penjelasan tersebut, atas dasar nilai tertinggi dan terendah maka dapat ditentukan panjang kelas interval masing-masing variabel dengan cara:

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria}}$$

Dengan demikian, maka akan dapat ditentukan panjang interval kelas masing-masing variabel adalah:

1. Untuk variabel pengawasan keuangan daerah (X_1) terdapat 20 pertanyaan, nilai tertinggi variabel X adalah 5 sehingga ($5 \times 20 = 100$), sedangkan nilai terendah adalah 1, maka ($1 \times 20 = 20$). Kriteria untuk menilai Pengawasan keuangan daerah (X_1) rentang $\frac{100-20}{5} = 16$ maka penulis menentukan pedoman untuk kriteria pengawasan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Pedoman Kategorisasi Pengawasan keuangan daerah

Rentang Nilai	Kategori
20-35	Sangat Tidak Ketat
36-51	Tidak Ketat
52-67	Cukup Ketat

68-83	Ketat
84-100	Sangat Ketat

2. Untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan (X_2) terdapat 17 pertanyaan, nilai tertinggi variabel X adalah 5 sehingga ($5 \times 17 = 85$), sedangkan nilai terendah adalah 1, maka ($1 \times 17 = 17$). Kriteria untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan (X_2) rentang $\frac{85-17}{5} = 13,6$ maka penulis menentukan pedoman untuk kriteria akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pedoman Kategorisasi Akuntabilitas pengelolaan keuangan

Rentang Nilai	Kategori
17-30,5	Sangat Tidak Akuntabel
30,6-44,1	Tidak Akuntabel
44,2-57,7	Akuntabel
57,8-71,3	Cukup Akuntabel
71,4-85	Sangat Akuntabel

3. Untuk variabel transparansi pengelolaan keuangan (X_3) terdapat 11 pertanyaan, nilai tertinggi variabel X adalah 5 sehingga ($5 \times 11 = 55$), sedangkan nilai terendah adalah 1, maka ($1 \times 11 = 11$). Kriteria untuk menilai

transparansi pengelolaan keuangan (X_3) rentang $\frac{55-11}{5}=8,8$, maka penulis menentukan pedoman untuk kriteria transparansi pengelolaan keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.10

Pedoman Kategorisasi Transparansi pengelolaan keuangan

Rentang Nilai	Kategori
11-19,7	Sangat Tidak Transparan
19,8-28,5	Tidak Transparan
28,6-37,3	Transparan
37,4-46,1	Cukup Transparan
46,2-55	Sangat Transparan

4. Untuk variabel kinerja pemerintah daerah (Y) terdapat 14 pertanyaan, nilai tertinggi variabel X adalah 5 sehingga ($5 \times 14 = 70$), sedangkan nilai terendah adalah 1, maka ($1 \times 14 = 14$). Kriteria untuk menilai Kinerja pemerintah daerah (Y) rentang $\frac{70-14}{5}=11,2$, maka penulis menentukan pedoman untuk kriteria kinerja pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 3.11**Pedoman Kategorisasi Kinerja pemerintah daerah**

Rentang Nilai	Kategori
14-25,1	Sangat Tidak Baik
25,2-36,3	Tidak Baik
36,4-47,5	Baik
47,6-58,7	Cukup Baik
58,8-70	Sangat Baik

3.5.2 Transformasi Data Ordinal menjadi Data Interval

Data yang dihasilkan kuesioner penelitian memiliki skala pengukuran ordinal. Untuk memenuhi persyaratan data dan untuk keperluan analisis regresi yang mengharuskan skala pengukuran data minimal skala interval, maka data yang berskala ordinal tersebut harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval (MSI)*. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menghitung distribusi frekuensi setiap pilihan jawaban responden.
2. Menghitung proporsi dari setiap jawaban berdasarkan distribusi frekuensi.
3. Menghitung proporsi kumulatif dengan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.

4. Menghitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi normal.
5. Menentukan nilai densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh dengan menggunakan tabel tinggi densitas.
6. Menghitung *scale value* (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut ini:

$$Scale Value = \frac{Densitas\ at\ lower\ limit - Densitas\ at\ upper\ limit}{Area\ below\ upper\ limit - Area\ below\ lower\ limit}$$

Keterangan:

Densitas at lower limit = kepadatan batas bawah

Densitas at upper limit = kepadatan batas atas

Area below upper limit = daerah di bawah batas atas

Area below lower limit = daerah di bawah batas bawah

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang mendasari dalam penggunaan regresi mencakup:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang

digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov Smirnov Test* menggunakan program SPSS 23.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi variabel-variabel bebas antara yang satu dengan yang lainnya. Ada tidaknya terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF). Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $\text{tolerance} < 0.10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} > 10$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan uji korelasi rank spearman.

3.5.4 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen

Uji validitas dan reliabilitas adalah suatu alat pengumpul data yang dilakukan untuk mengetahui kesahihan (*valid*) dan kehandalan (*reliabel*) kuesioner sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Uji validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak.

Sedangkan uji reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrumen digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama pula.

Sugiyono (2017:102) menyatakan bahwa:

“Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.”

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi, instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliabel. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi obyek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data.

3.5.4.1 Uji Validitas Instrumen

Tujuan uji validitas ialah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Uji validitas harus digunakan pada jenis data primer, terutama data yang didapatkan dan diolah dari metode penelitian dengan penyebaran kuesioner atau angket. Karena, biasanya jika dengan penyebaran

kuesioner bisa saja para responden menjawab dengan asal atau tidak dengan teliti atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut. Maka dari itu, data yang dihasilkan dari kuesioner tersebut harus di nilai apakah valid atau tidak. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:121) menyatakan bahwa

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat suatu instrumen penelitian dapat dikatakan *valid* menurut Sugiyono (2017:127) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:

Jika $r \geq 0,3$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah *valid*.

Jika $r < 0,3$ maka item-item pertanyaan dari koesioner adalah tidak *valid*.

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \times \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana:

r_{xy} = koefisien korelasi

Σxy = jumlah perkalian variabel x dan y

Σx = jumlah nilai variabel x

Σy = jumlah nilai variabel y

Σx^2 = jumlah pangkat dua nilai variabel x

Σy^2 = jumlah pangkat dua nilai variabel y

n = banyaknya sampel

3.5.4.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skorer satu dengan skorer lainnya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu.

Menurut Sugiyono (2017:121) menyatakan bahwa:

“Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.”

Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga instrumen ini dapat digunakan dengan aman karena dapat bekerja sama dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Adapun kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini.

Jika nilai Alpha $\geq 0,6$ maka instrumen bersifat reliabel.

Jika nilai Alpha $< 0,6$ maka instrumen tidak reliabel.

Uji realibilitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Spearman Brown menurut Sugiyono (2017:136) dengan rumus sebagai berikut:

$$r_1 = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan :

r_1 = Realibilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.

3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yaitu suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2017:192), persamaan analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen

A = Konstanta/ nilai Y jika $X = 0$

b_1, b_2 = Koefisien arah regresi yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X

X_1 = Variabel independen 1

X_2 = Variabel independen 2

3.5.6 Uji Korelasi

Untuk menghitung keeratan hubungan atau koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y , dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan analisis koefisien korelasi *spearman's rho*. Rumusnya yaitu yaitu:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

r_s = Koefisien korelasi *Rank Spearman* yang menunjukkan keeratan hubungan antara unsur-unsur variabel X dan variabel Y

d_i = Selisih mutlak antara rangking data variabel X dan variabel Y ($X_i - Y_i$)

n = Banyaknya responden atau sampel yang diteliti

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat disimpulkan pada ketentuan-ketentuan untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi diantaranya yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat

0,80 – 1,000	Sangat kuat
--------------	-------------

Sumber: Sugiyono, 2017:183

3.5.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.5.7.1 Penetapan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian.

Sugiyono (2017:93) menyatakan bahwa:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari dua variabel yang dalam hal ini adalah pengendalian internal, kepuasan kerja, moralitas manajemen dan budaya etis organisasi terhadap efektivitas kecurangan dengan menggunakan perhitungan statistik. Berdasarkan rumusan masalah, maka diajukan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya.

Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_0 : \beta_3 = 0$, artinya Transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_a : \beta_3 \neq 0$, artinya Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_0 : \beta_3 = 0$, artinya pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

$H_a : \beta_3 \neq 0$, artinya pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah.

3.5.7.2 Penentuan Taraf Signifikan

Sebelum pengujian dilakukan maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf signifikansinya. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Taraf signifikan yang dipilih dan ditetapkan dalam penelitian ini adalah 0,5. ($\alpha = 0,05$) dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Angka ini dipilih

karena dapat mewakili hubungan variabel yang diteliti dan merupakan suatu taraf signifikansi yang sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu sosial.

3.5.8 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji-t satu, taraf kepercayaan 95%, kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga thitung setiap variabel independen atau membandingkan nilai thitung dengan nilai yang ada pada t_{tabel} , maka H_a diterima dan sebaiknya thitung tidak signifikan dan berada dibawah t_{tabel} , maka H_a ditolak. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji statistik t adalah sebagai berikut :

1. Menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji t, dengan melihat asumsi sebagai berikut:
 - a. Interval keyakinan $\alpha = 0,05$
 - b. Derajat kebebasan = $n-k-1$
 - c. Kaidah keputusan: Tolak H_0 (terima H_a), jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Terima H_0 (tolak H_a), jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Apabila H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh atau hubungan yang tidak positif, sedangkan apabila H_0 ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah signifikan.

2. Menemukan t_{hitung} dengan menggunakan statistik uji t, dengan rumus statistik:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

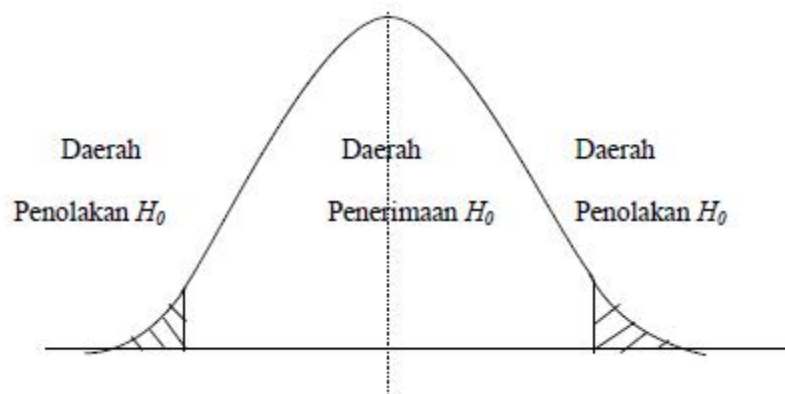
Keterangan :

r = koefisien korelasi

t = nilai koefisien korelasi dengan derajat bebas (dk) = $n-k-1$

n = jumlah sampel

3. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}



Gambar 3.2 Uji T

(Sumber: Sugiyono, 2017:185)

Distribusi t ini ditentukan oleh derajat kesalahan $dk = n-2$. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. H_0 ditolak jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau nilai $\text{Sig} < \alpha$
- b. H_0 diterima jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ atau nilai $\text{Sig} > \alpha$

Apabila H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak positif, sedangkan apabila H_0 ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah positif. Agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan

pengolahan data, serta agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat maka peneliti menggunakan bantuan program SPSS 23.

3.5.9 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F adalah Uji F atau koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017:192) Uji F didefinisikan dengan rumus sebagai berikut:

$$F_n = \frac{r^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

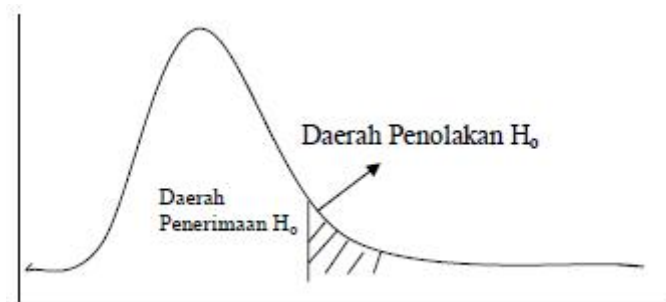
F_n = Nilai uji f

R = Koefisien korelasi berganda.

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Kriteria Pengambilan Keputusan



Gambar 3.3 Uji F

Sumber: Sugiyono (2017:187)

Setelah mendapat nilai F_{hitung} ini, kemudian dibandingkan dengan nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Artinya kemungkinan besardari hasil kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau korelasi kesalahan sebesar 5%.Bisa juga dengan *degree freedom* = $n-k-1$ dengan kriteria sebagai berikut:

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Jika terjadi penerimaan H_0 , maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

3.5.10 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Menurut Gujarati (2012:172) untuk melihat besar pengaruh dari setiap

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

Zero Order = Koefisien korelasi

β = Koefisien beta

Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel dependen.

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila *adjusted R²* semakin besar mendekati 1 maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila *adjusted R²* semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

K_d = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi

3.6 Rancangan Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017:199) mengemukakan bahwa:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau bisa juga melalui internet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden dengan pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden dapat memilih salah satu jawaban alternatif dari pertanyaan yang telah tersedia.

Berdasarkan judul penelitian, kuesioner akan dibagikan kepada masing-masing bagian keuangan pada dinas-dinas di Kab. Bandung Barat. Kuesioner ini terdiri dari 64 pertanyaan, yaitu 20 (Sembilan belas) pertanyaan untuk Pengawasan keuangan daerah (X_1), 19 (Sembilan belas) pertanyaan untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X_2), 11 (Sebelas) pertanyaan untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_3), dan 14 (empat belas) pertanyaan untuk Kinerja pemerintah daerah (Y).